

The grease of the wheel di Indonesia: Pengaruh korupsi terhadap realisasi pendapatan dan belanja daerah

Sanda Aditiya Arsandi

Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Kav. 40-42, Jl. Gatot Subroto No.7, Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, 12190, Indonesia

sanda.aditiya@kemenkeu.go.id

* Corresponding Author

Abstrak: Penelitian terdahulu mengungkap bahwa korupsi dianggap memiliki dua jenis efek terhadap perekonomian. Korupsi dipandang sebagai penghambat tetapi juga dipandang sebagai “*grease of wheel*” yang mempercepat perputaran roda ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi korupsi di Indonesia setelah desentralisasi fiskal. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengujian dilakukan menggunakan analisis korelasi selama 2006 – 2020 untuk melihat pengaruh korupsi di daerah dan swasta terhadap dimensi ekonominya. Hasilnya, korupsi di daerah berpengaruh positif signifikan terhadap korupsi di sektor swasta. Keduanya juga berpengaruh positif signifikan terhadap realisasi pendapatan dan belanja daerah. Hasil ini menjelaskan bahwa di Indonesia, korupsi merupakan “*grease of wheel*” serta mengindikasikan bahwa desentralisasi fiskal tidak menghambat jumlah korupsi di daerah.

Kata Kunci: Korupsi; *Grease Of Wheel*; Pendapatan Daerah; Belanja Daerah; Desentralisasi Fiskal; JEL Classification: H75, H76, R5

How to Cite: Arsandi, S. A. (2022). The grease of the wheel: The correlation between corruption, regional revenue and expenditure in Indonesia. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(2), 193-204. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i2.938>



Pendahuluan

Berbagai aspek kajian memiliki konsep dualitas (Adiguna & Warsono, 2019). Suatu fenomena dapat dipandang dari dua sisi yang berseberangan. Dualitas ini biasanya terjadi karena ditemukan perbedaan antara teori dan praktik atau antara harapan dan kenyataan. Sebagai kajian tentang ilmu sosial, fenomena korupsi juga dapat dipandang memiliki dua perspektif.

Perspektif pertama adalah pandangan yang melihat korupsi sebagai penghambat roda ekonomi. Korupsi dianggap memberikan efek negatif terhadap investasi domestik (Zakharov, 2019), investasi asing (Kasasbeh et al., 2018), pertumbuhan ekonomi (Baklouti & Boujelbene, 2020), komposisi anggaran (Hessami, 2014), ukuran belanja pemerintah (Tanzi & Davoodi, 1998), beban perusahaan (Hossain et al., 2020), suplai tenaga kerja (Cooray & Dzhumashev, 2018), kesenjangan, dan tingkat kemiskinan (Saha et al., 2021). Secara umum, korupsi memiliki dampak negatif pada tataran mikro maupun makro (Boudreaux et al., 2018).

Perspektif selanjutnya memandang korupsi sebagai pelumas dari roda ekonomi. Adanya korupsi akan mempercepat jalannya roda ekonomi. Pendapat tersebut diangkat dalam penelitian Leff (Leff, 1964), Huntington (Huntington, 2006), dan Lui (1985). Akan tetapi pendapat tersebut disangkal lebih jauh lewat penelitian Wei (Wei, 1999) yang menyebutkan bahwa korupsi sebagai “*grease of wheel*” hanya akan terjadi di negara yang memiliki aturan birokrasi industri yang terlalu banyak. Fenomena ini sering ditemukan di negara Asia sehingga disebut juga sebagai Asian Paradox (Vial & Hanoteau, 2010). Melalui data panel 142 negara, Song, Chang, dan Gong (2021) menemukan bahwa korupsi hanya akan mempengaruhi ekonomi dan pertumbuhan keuangan pada negara berkembang tetapi tidak akan berpengaruh pada negara maju.

Melihat kedua pandangan tersebut, penulis tertarik untuk melihat bagaimana pengaruh korupsi terhadap perekonomian daerah di Indonesia. Peneliti mengambil aspek penerimaan dan belanja pemerintah daerah sebagai objek. Ruang lingkup penelitian dilakukan terhadap data panel tahun 2006-2020. Ini adalah saat di mana Indonesia telah menerapkan desentralisasi fiskal secara

penuh. Sejak dilakukannya desentralisasi fiskal pada tahun 2001, kewenangan ekonomi diserahkan kepada pemerintah daerah.

Pengaruh desentralisasi terhadap korupsi sendiri juga memiliki dualisme pendapat. Di satu sisi terdapat penelitian yang menyebutkan bahwa semakin tinggi kewenangan desentralisasi yang diberikan, semakin rendah tingkat korupsi yang terjadi (Mello & Barenstein, 2001). Pandangan lainnya menyebutkan bahwa desentralisasi yang menurunkan korupsi, hanya akan sukses diterapkan di negara kaya. Untuk negara miskin, desentralisasi hanya akan memperparah korupsi (Lessmann & Markwardt, 2010). Hal ini semakin memperkuat urgensi dilakukannya penelitian ini untuk melihat bagaimana pengaruh korupsi yang dilakukan oleh pemerintahan daerah di tingkat kabupaten/kota terhadap pendapatan dan belanja daerah. Penelitian ini juga penting untuk melihat pengaruh desentralisasi ekonomi terhadap tingkat korupsi di daerah.

Indonesia menjadi negara yang sering dijadikan objek penelitian kasus korupsi. Selain karena Indonesia adalah negara berkembang dengan berbagai permasalahan yang kompleks, kasus korupsi yang ditemukan di Indonesia relatif banyak. Indonesia juga telah mengalami berbagai fase kepemimpinan mulai dari demokrasi terpimpin hingga desentralisasi fiskal.

Sebagaimana penelitian di seluruh dunia, penelitian terdahulu di Indonesia juga menghasilkan dualisme perspektif. Pengaruh korupsi di Indonesia dianggap dapat memberikan efek negatif atau positif bagi berbagai dimensi pertumbuhan ekonomi. Ada juga penelitian yang melihat, dalam batas tertentu, korupsi dapat memberikan pengaruh yang berbeda di Indonesia.

Dengan menggunakan *threshold model*, korupsi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi apabila berada di atas ambang batas korupsi dan sebaliknya apabila berada di bawah ambang batas korupsi (Alfada, 2019). Sebagai bagian dari dua belas objek penelitian di Asia Pasifik, fenomena “Asian Paradox” dianggap terjadi di Indonesia. Korupsi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Nawatmi, 2016). Korupsi juga berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan industri (Vial & Hanoteau, 2010) di era pemerintahan Presiden Suharto (1975-1995). Penelitian ini menjelaskan korupsi sebagai *grease of wheel* industri di Indonesia. Sementara itu, di sisi lain, di Indonesia korupsi dianggap berperan dalam meningkatkan kemiskinan (Samputra & Munandar, 2019), menghambat pertumbuhan industri daerah (Arsandi, 2022) dan penurunan kesejahteraan masyarakat (Putra & Linda, 2022).

Untuk pengaruh desentralisasi fiskal, penelitian di Indonesia juga menunjukkan hasil yang berbeda. Korupsi dianggap menurun sebagai akibat desentralisasi dalam penelitian dengan objek tahun 2001 dan 2004 (Henderson & Kuncoro, 2011). Sedangkan dengan menggunakan Model Tobit untuk menjelaskan pengolahan hasil kasasi Mahkamah Agung selama tahun 2001-2009, diperoleh hasil bahwa semakin tinggi tingkat desentralisasi, semakin tinggi korupsi yang terjadi.

Penelitian ini akan menguji pengaruh korupsi di era desentralisasi fiskal dalam kurun waktu 2006-2020 terhadap aspek ekonomi daerah. Dimensi aspek ekonomi daerah yang digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah (PAD), Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah dari sisi penerimaan. Sedangkan dari sisi belanja, digunakan variabel realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Variabel tersebut digunakan karena merupakan perwujudan dari asas desentralisasi fiskal (Asmarani, 2020). PAD adalah sumber pendanaan yang diperoleh daerah berdasarkan potensi dan peraturan perundang-undangan setempat (BPS, 2019). Sedangkan belanja langsung dan tidak langsung adalah perwujudan bagaimana daerah menggunakan uangnya untuk menggerakkan ekonomi di daerahnya. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah beberapa jenis PAD. Jenis PAD lainnya adalah hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendefinisian variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Menurut kedua Undang-Undang tersebut, desentralisasi fiskal adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan keuangan daerahnya masing-masing (Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, 2004; Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 2004).

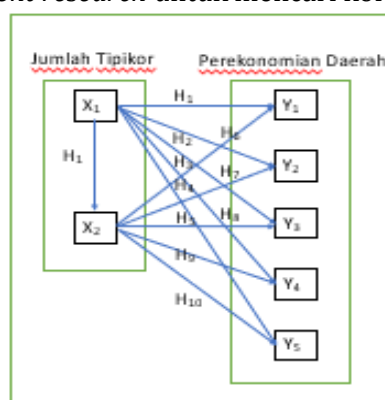
Sebagai variabel independen dalam penelitian ini, korupsi didefinisikan oleh Bank Dunia sebagai tindakan penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi (World Bank, 2020). Ruang lingkup korupsi dalam penelitian ini adalah korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota se-Indonesia..

Metode

Penelitian dilakukan di Indonesia berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2021). Untuk meneliti pengaruh korupsi pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap belanja dan pendapatan daerah di era desentralisasi fiskal digunakan data penelitian selama lima belas tahun (2006 – 2020).

Variabel independen yang digunakan adalah jumlah kasus korupsi yang dilakukan di lingkup pemerintah kabupaten/kota serta kasus korupsi yang dilakukan oleh pihak swasta sebagai pihak yang berseberangan dengan pemerintahan. Variabel dependen yang digunakan meliputi komponen dalam pendapatan dan belanja daerah. Untuk pendapatan daerah, digunakan data seluruh kabupaten/kota yang meliputi total realisasi pendapatan asli daerah, total realisasi pajak daerah, dan total realisasi retribusi daerah. Sedangkan untuk belanja daerah, digunakan data total realisasi belanja langsung dan total realisasi belanja tidak langsung.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Terdapat beberapa langkah analisis yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis korelasi. Analisis dilakukan dengan bantuan *software* SPSS versi 23. Penelitian ini termasuk *experiment research* untuk mencari korelasi antarvariabel.



Gambar 1. Kerangka Model Penelitian

Beberapa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁: $\alpha_1 \neq 0$; korupsi yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota (X₁) berkorelasi dengan realisasi pendapatan asli daerah seluruh kabupaten/kota di Indonesia (Y₁).
- H₂: $\alpha_1 \neq 0$; korupsi yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota (X₁) berkorelasi dengan realisasi pajak daerah seluruh kabupaten/kota di Indonesia (Y₂).
- H₃: $\alpha_1 \neq 0$; korupsi yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota (X₁) berkorelasi dengan realisasi retribusi daerah seluruh kabupaten/kota di Indonesia (Y₃).
- H₄: $\alpha_1 \neq 0$; korupsi yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota (X₁) berkorelasi dengan realisasi belanja langsung seluruh kabupaten/kota di Indonesia (Y₄).
- H₅: $\alpha_1 \neq 0$; korupsi yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota (X₁) berkorelasi dengan realisasi belanja tidak langsung seluruh kabupaten/kota di Indonesia (Y₅).
- H₆: $\alpha_1 \neq 0$; korupsi yang dilakukan swasta (X₂) berkorelasi dengan realisasi pendapatan asli daerah seluruh kabupaten/kota di Indonesia (Y₁).
- H₇: $\alpha_1 \neq 0$; korupsi yang dilakukan swasta (X₂) berkorelasi dengan realisasi pajak daerah seluruh kabupaten/kota di Indonesia (Y₂).
- H₈: $\alpha_1 \neq 0$; korupsi yang dilakukan swasta (X₂) berkorelasi dengan realisasi retribusi daerah seluruh kabupaten/kota di Indonesia (Y₃).
- H₉: $\alpha_1 \neq 0$; korupsi yang dilakukan swasta (X₂) berkorelasi dengan realisasi belanja langsung seluruh kabupaten/kota di Indonesia (Y₄).

H₁₀: $\alpha_1 \neq 0$: korupsi yang dilakukan swasta (X₂) berkorelasi dengan realisasi belanja tidak langsung seluruh kabupaten/kota di Indonesia (Y₅).

H₁₁: $\alpha_1 \neq 0$; korupsi yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota (X₁) berkorelasi dengan korupsi yang dilakukan swasta (X₂).

Berdasarkan hipotesis yang diajukan, dapat disusun kerangka model penelitian seperti terlihat pada Gambar 1.

Hasil dan Pembahasan

Sebagai bagian dari penelitian kuantitatif, penelitian ini dilakukan melalui tiga langkah pengujian. Pertama akan dilakukan uji statistik deskriptif untuk melihat gambaran nilai statistik yang akan diolah. Kedua akan dilakukan uji asumsi klasik berupa uji normalitas. Ketiga dilakukan uji korelasi untuk mengetahui hubungan antar variabel.

Setelah dilakukan teknik pembersihan data sesuai dengan variabel yang dipilih, diperoleh data observasi sebagaimana tercantum dalam Tabel 1. Tabel 1 adalah data observasi yang digunakan sebagai variabel yang meliputi jumlah korupsi yang dilakukan di pemerintah kabupaten/kota, jumlah korupsi yang dilakukan swasta, realisasi PAD, realisasi pajak daerah, realisasi retribusi daerah, realisasi belanja langsung, dan realisasi belanja tidak langsung. Seluruh data disajikan selama kurun waktu 2006-2020.

Tabel 1. Observasi Penelitian

Tahun	Jumlah Tipikor Pemda ¹	Jumlah Tipikor Swasta ¹	Pendapatan Asli Daerah ²	Pajak Daerah ²	Retribusi Daerah ²	Belanja Tidak Langsung ²	Belanja Langsung ²
2006	4	5	13.961.949.844	4.628.027.870	4.594.277.558	87.405.357.099	99.652.408.963
2007	8	3	16.444.847.075	5.380.379.942	5.388.033.569	108.548.513.241	133.045.900.061
2008	18	12	20.243.578.574	6.686.430.135	6.151.199.970	134.527.570.742	143.692.431.250
2009	5	11	22.119.800.351	7.458.537.044	6.206.761.426	156.617.007.328	146.926.567.973
2010	8	8	24.555.374.138	8.711.056.255	6.260.523.509	188.322.077.646	142.008.916.727
2011	7	10	34.914.155.160	15.983.344.717	6.582.330.785	211.758.966.246	174.472.951.236
2012	10	16	45.540.971.484	22.050.755.049	7.090.331.555	236.101.675.857	203.351.689.273
2013	18	24	28.287.785.192	8.789.639.585	2.933.002.268	260.929.072.784	252.386.008.253
2014	19	16	77.640.520.139	35.810.965.970	10.561.206.450	287.007.446.355	295.157.998.331
2015	10	18	87.951.981.237	40.313.201.151	9.254.158.843	336.126.086.659	329.221.820.062
2016	21	28	96.257.774.436	44.843.906.635	8.342.625.938	383.243.126.468	355.399.435.814
2017	53	28	125.170.736.237	54.380.243.870	7.896.390.431	374.905.467.902	373.641.975.808
2018	114	56	114.344.840.325	58.005.909.061	7.623.228.294	392.749.572.715	374.647.448.862
2019	66	59	124.517.905.393	64.822.598.306	8.042.041.404	416.557.391.992	413.823.909.879
2020	48	32	132.784.328.921	68.395.127.774	9.990.024.618	461.776.410.508	415.997.751.574

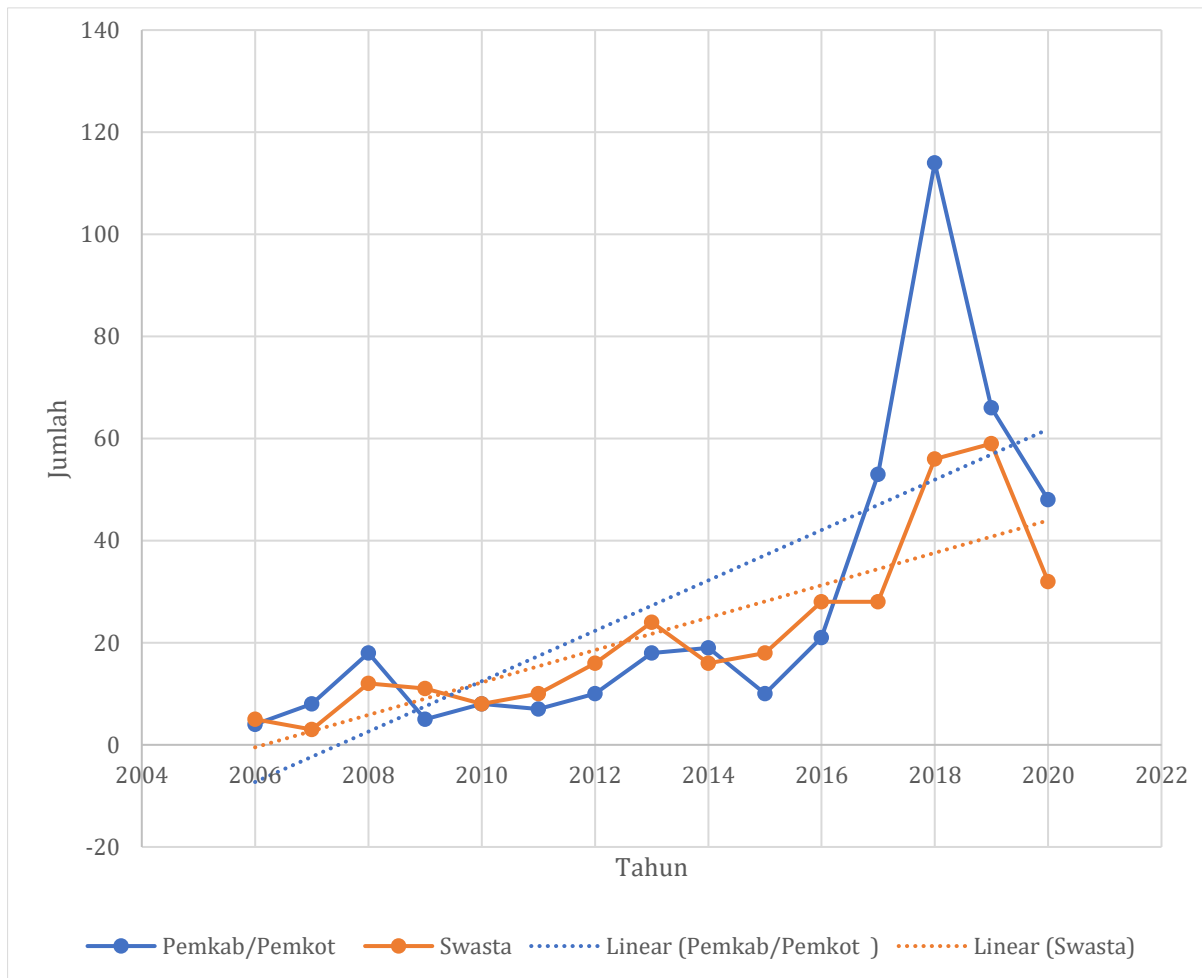
Sumber: diolah dari data publikasi KPK¹ dan BPS²

Berdasarkan pengolahan statistik deskriptif terhadap data observasi, diperoleh hasil sebagaimana Tabel 2. Korupsi yang terjadi di kabupaten/kota memiliki jumlah minimum 4 kasus (2006), maksimum 114 kasus (2018), dan rata-rata 27,27 kasus. Sementara itu, korupsi yang terjadi di sektor swasta memiliki jumlah minimum 3 kasus (2007), maksimum 59 kasus (2019), dan rata-rata 21,73 kasus. Berdasarkan Gambar 2, dapat dilihat bahwa jumlah korupsi di kabupaten/kota dan di swasta memiliki tren yang semakin meningkat.

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Jumlah Tipikor

	N	Range	Min	Max	Mean	Std. Dev.	Var	Kurtosis
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic
korupsi di kabupaten/kota	15	110	4	114	27.27	7.923	30.684	941.495
korupsi di swasta	15	56	3	59	21.73	4.364	16.901	285.638
Valid N (listwise)	15							3.749

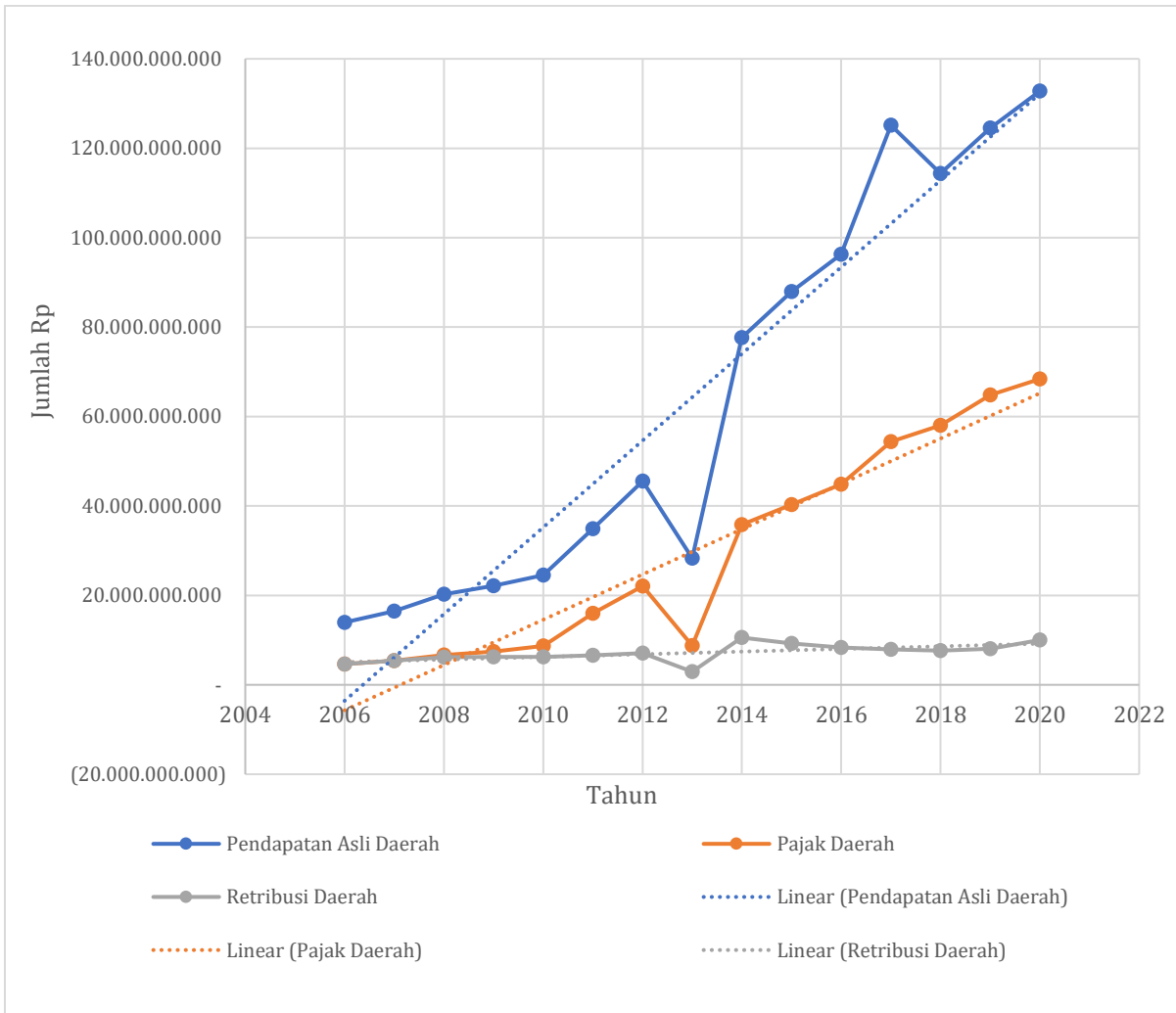
Sumber: diolah dari data publikasi KPK melalui SPSS versi 23



Gambar 2. Tren Korupsi di Pemerintah Kabupaten/Kota dan Swasta (diolah dari data publikasi KPK)

Berdasarkan pengolahan statistik deskriptif terhadap data variabel ekonomi keuangan daerah, diperoleh hasil sebagaimana Tabel 3. Total realisasi PAD paling rendah adalah Rp13.961.949.844 (2006), paling tinggi adalah Rp132.784.328.921 (2020), dan rata-rata adalah Rp64.315.769.900. Total realisasi Pajak Daerah paling rendah adalah Rp4.628.027.870 (2006), paling tinggi adalah Rp68.395.127.774 (2020), dan rata-rata adalah Rp29.750.674.891. Total realisasi Retribusi Daerah paling rendah adalah Rp2.933.002.268 (2013), paling tinggi adalah Rp10.561.206.450 (2014), dan rata-rata adalah Rp7.127.742.441. Gambar 3 menunjukkan tren PAD, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah yang cenderung meningkat.

Untuk kategori belanja, Total realisasi Belanja Langsung paling rendah adalah Rp99.652.408.963 (2006), paling tinggi adalah Rp415.997.751.574 (2020), dan rata-rata adalah Rp256.895.147.604. Total realisasi Belanja Tidak Langsung paling rendah adalah Rp87.405.357.099 (2006), paling tinggi adalah Rp461.776.410.508 (2020), dan rata-rata adalah Rp269.105.049.569. Gambar 4 menunjukkan tren Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang cenderung meningkat seiring berjalannya waktu.



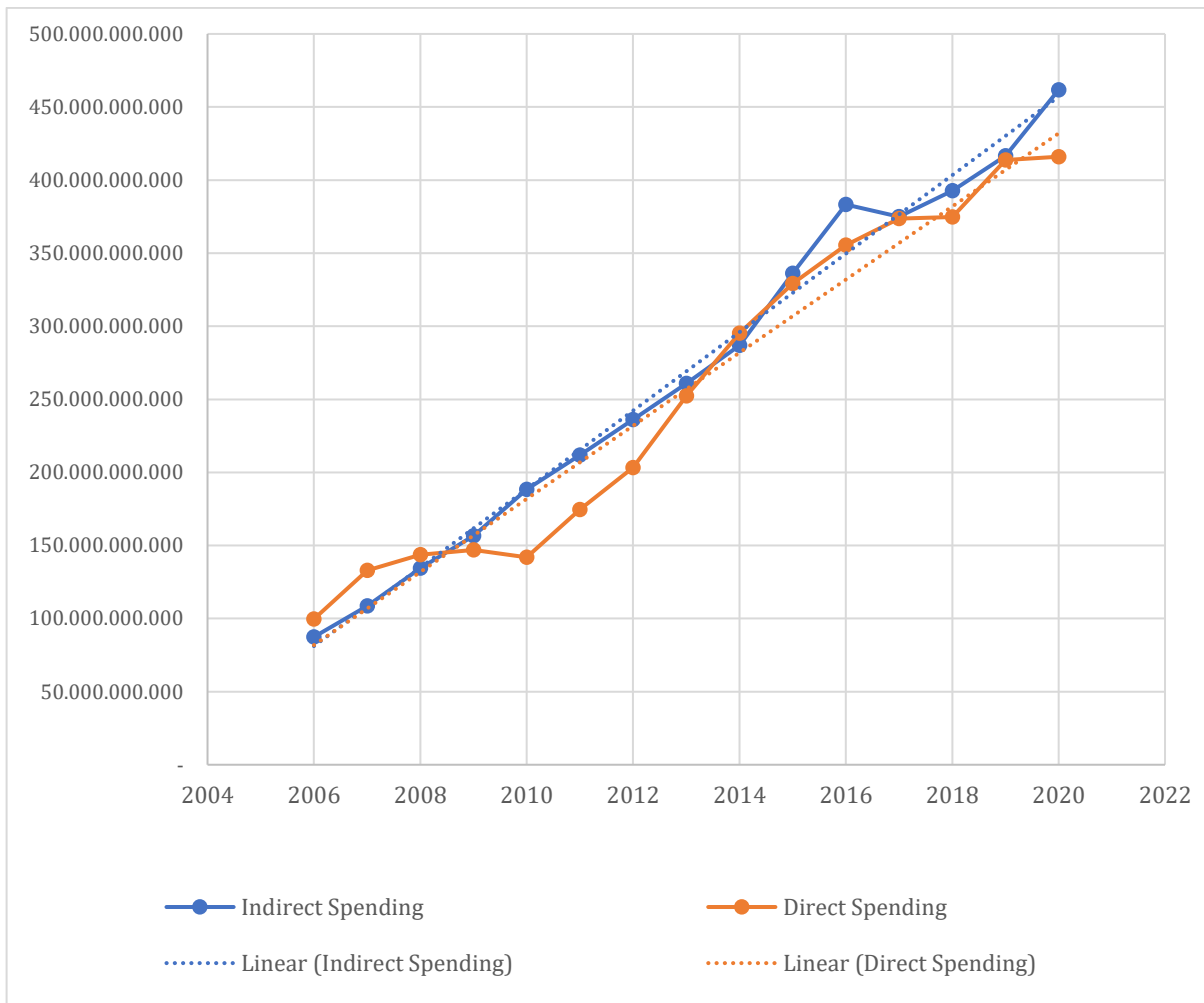
Gambar 3. Tren Pertumbuhan Pendapatan PAD, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah (diolah dari data BPS)

Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Dimensi Ekonomi Daerah

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error
PAD	15	13.961.949.844	132.784.328.921	64.315.769.900	45.450.781.634	-1,705	1,121
pajak daerah	15	4.628.027.870	68.395.127.774	29.750.674.891	23.738.641.456	-1,512	1,121
retribusi daerah	15	2.933.002.268	10.561.206.450	7.127.742.441	2.027.398.954	,082	1,121
belanja tidak langsung	15	87.405.357.099	461.776.410.508	269.105.049.569	120.627.622.758	-1,331	1,121
belanja langsung	15	99.652.408.963	415.997.751.574	256.895.147.604	113.918.939.443	-1,724	1,121
Valid N (listwise)	15						

Sumber: diolah dari data BPS melalui SPSS versi 23

Selanjutnya, dilakukan uji, normalitas untuk mengetahui apakah residual data masing-masing variabel memiliki distribusi yang normal. Berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov Smirnov pada Tabel 4, diperoleh informasi bahwa nilai signifikansi variabel sebesar 0,200. Nilai ini lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang akan diuji telah terdistribusi normal.



Gambar 4. Tren Pertumbuhan Belanja Langsung dan Tidak Langsung (diolah dari data BPS)

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	11.39457229
Most Extreme Differences	Absolute	.166
	Positive	.166
	Negative	-.134
Test Statistic		.166
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: diolah dari data BPS melalui SPSS versi 23

Setelah dilakukan Uji Kolmogorov Smirnov untuk pengujian distribusi normal, selanjutnya dilakukan pengujian korelasi untuk menguji hubungan antar variabel dengan hasil sebagaimana Tabel 5. Berdasarkan Tabel 5, diperoleh informasi bahwa nilai r hitung untuk hubungan antara jumlah korupsi di kabupaten/kota (x_1) dan PAD (y_1) adalah sebesar $0,738 > r$ tabel ($0,514$ [$N=15$, $\alpha=5\%$]) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara jumlah korupsi di kabupaten/kota (x_1) dan PAD (y_1). Nilai sig. (2-tailed) antara jumlah korupsi di kabupaten/kota (x_1) dan PAD (y_1) adalah sebesar $0,002 < 0,05$ yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara jumlah korupsi di kabupaten/kota (x_1) dan PAD (y_1).

Selanjutnya, berdasarkan nilai r hitung untuk hubungan antara jumlah korupsi di kabupaten/kota (x_1) dan pajak daerah (y_2) adalah sebesar $0,754 > r$ tabel ($0,514$ [$N=15$, $\alpha=5\%$]) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara jumlah korupsi di kabupaten/kota (x_1)

dan pajak daerah (y_2). Nilai sig. (2-tailed) antara jumlah korupsi di kabupaten/kota (x_1) dan pajak daerah (y_2) adalah sebesar $0,001 < 0,05$ yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara jumlah korupsi di kabupaten/kota (x_1) dan pajak daerah (y_2).

Untuk variabel retribusi daerah, berdasarkan nilai r hitung untuk hubungan antara jumlah korupsi di kabupaten/kota (x_1) dan retribusi daerah (y_3) adalah sebesar $0,315 < r$ tabel ($0,514 [N=15, \alpha=5\%]$) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi antara jumlah korupsi di kabupaten/kota (x_1) dan retribusi daerah (y_3). Nilai sig. (2-tailed) antara jumlah korupsi di kabupaten/kota (x_1) dan retribusi daerah (y_3) adalah sebesar $0,253 > 0,05$ yang berarti tidak terdapat korelasi yang signifikan antara jumlah korupsi di kabupaten/kota (x_1) dan retribusi daerah (y_3).

Selanjutnya, berdasarkan nilai r hitung untuk hubungan antara jumlah korupsi di kabupaten/kota (x_1) dan belanja tidak langsung (y_4) adalah sebesar $0,686 > r$ tabel ($0,514 [N=15, \alpha=5\%]$) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara jumlah korupsi di kabupaten/kota (x_1) dan belanja tidak langsung (y_4). Nilai sig. (2-tailed) antara jumlah korupsi di kabupaten/kota (x_1) dan belanja tidak langsung (y_4) adalah sebesar $0,005 < 0,05$ yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara jumlah korupsi di kabupaten/kota (x_1) dan belanja tidak langsung (y_4).

Tabel 5. Hasil Uji Korelasi

		korupsi di kab/kota	korupsi di swasta	PAD	pajak daerah	retribusi daerah	belanja tidak langsung	belanja langsung
korupsi di kab/kota	Pearson	1	.764**	.738**	.754**	,315	.686**	.711**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)		,001	,002	,001	,253	,005	,003
	N	15	15	15	15	15	15	15
korupsi di swasta	Pearson	.764**	1	.683**	.647**	,322	.630*	.657**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	,001		,005	,009	,241	,012	,008
	N	15	15	15	15	15	15	15
PAD	Pearson	.738**	.683**	1	.994**	.738**	.957**	.970**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	,002	,005		,000	,002	,000	,000
	N	15	15	15	15	15	15	15
pajak daerah	Pearson	.754**	.647**	.994**	1	.742**	.954**	.962**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	,001	,009	,000		,002	,000	,000
	N	15	15	15	15	15	15	15
retribusi daerah	Pearson	,315	,322	.738**	.742**	1	.667**	.663**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	,253	,241	,002	,002		,007	,007
	N	15	15	15	15	15	15	15
belanja tidak langsung	Pearson	.686**	.630*	.957**	.954**	.667**	1	.984**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	,005	,012	,000	,000	,007		,000
	N	15	15	15	15	15	15	15
belanja langsung	Pearson	.711**	.657**	.970**	.962**	.663**	.984**	1
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	,003	,008	,000	,000	,007	,000	
	N	15	15	15	15	15	15	15

Sumber: hasil pengolahan menggunakan SPSS versi 23

Untuk variabel belanja langsung, berdasarkan nilai r hitung untuk hubungan antara jumlah korupsi di kabupaten/kota (x_1) dan belanja langsung (y_5) adalah sebesar $0,711 > r$ tabel ($0,514$

[$N=15, \alpha=5\%$]) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara jumlah korupsi di kabupaten/kota (x_1) dan belanja langsung (y_5). Nilai sig. (2-tailed) antara jumlah korupsi di kabupaten/kota (x_1) dan belanja langsung (y_5) adalah sebesar $0,003 < 0,05$ yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara jumlah korupsi di kabupaten/kota (x_1) dan belanja langsung (y_5).

Selanjutnya hasil uji pengaruh korupsi di swasta terhadap dimensi ekonomi daerah menunjukkan hasil yang mirip dengan pengaruh korupsi di pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan Tabel 5, diperoleh informasi bahwa nilai r hitung untuk hubungan antara jumlah korupsi di swasta (x_2) dan PAD (y_1) adalah sebesar $0,683 > r$ tabel ($0,514 [N=15, \alpha=5\%]$) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara jumlah korupsi di swasta (x_2) dan PAD (y_1). Nilai sig. (2-tailed) antara jumlah korupsi di swasta (x_2) dan PAD (y_1) adalah sebesar $0,005 < 0,05$ yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara jumlah korupsi di swasta (x_2) dan PAD (y_1).

Selanjutnya, berdasarkan nilai r hitung untuk hubungan antara jumlah korupsi di swasta (x_2) dan pajak daerah (y_2) adalah sebesar $0,647 > r$ tabel ($0,514 [N=15, \alpha=5\%]$) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara jumlah korupsi di swasta (x_2) dan pajak daerah (y_2). Nilai sig. (2-tailed) antara jumlah korupsi di kabupaten/kota (x_1) dan pajak daerah (y_2) adalah sebesar $0,009 < 0,05$ yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara jumlah korupsi di swasta (x_2) dan pajak daerah (y_2).

Untuk variabel retribusi daerah, berdasarkan nilai r hitung untuk hubungan antara jumlah korupsi di swasta (x_2) dan retribusi daerah (y_3) adalah sebesar $0,322 < r$ tabel ($0,514 [N=15, \alpha=5\%]$) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi antara jumlah korupsi di swasta (x_2) dan retribusi daerah (y_3). Nilai sig. (2-tailed) antara jumlah korupsi di kabupaten/kota (x_1) dan retribusi daerah (y_3) adalah sebesar $0,241 > 0,05$ yang berarti tidak terdapat korelasi yang signifikan antara jumlah korupsi di swasta (x_2) dan retribusi daerah (y_3).

Selanjutnya, berdasarkan nilai r hitung untuk hubungan antara jumlah korupsi di swasta (x_2) dan belanja tidak langsung (y_4) adalah sebesar $0,630 > r$ tabel ($0,514 [N=15, \alpha=5\%]$) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara jumlah korupsi di swasta (x_2) dan belanja tidak langsung (y_4). Nilai sig. (2-tailed) antara jumlah korupsi di swasta (x_2) dan belanja tidak langsung (y_4) adalah sebesar $0,012 < 0,05$ yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara jumlah korupsi di swasta (x_2) dan belanja tidak langsung (y_4).

Untuk variabel belanja langsung, berdasarkan nilai r hitung untuk hubungan antara jumlah korupsi di swasta (x_2) dan belanja langsung (y_5) adalah sebesar $0,657 > r$ tabel ($0,514 [N=15, \alpha=5\%]$) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara jumlah korupsi di swasta (x_2) dan belanja langsung (y_5). Nilai sig. (2-tailed) antara jumlah korupsi di swasta (x_2) dan belanja langsung (y_5) adalah sebesar $0,008 < 0,05$ yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara jumlah korupsi di swasta (x_2) dan belanja langsung (y_5).

Terakhir, untuk pengujian antar variabel independen, berdasarkan nilai r hitung untuk hubungan antara jumlah korupsi di kabupaten/kota (x_1) dan korupsi di swasta (x_2) adalah sebesar $0,764 > r$ tabel ($0,514 [N=15, \alpha=5\%]$) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara jumlah korupsi di kabupaten/kota (x_1) dan korupsi di swasta (x_2). Nilai sig. (2-tailed) antara jumlah korupsi di kabupaten/kota (x_1) dan korupsi di swasta (x_2) adalah sebesar $0,001 < 0,05$ yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara jumlah korupsi di kabupaten/kota (x_1) dan korupsi di swasta (x_2).

Berdasarkan Uji Korelasi tersebut diperoleh simpulan bahwa hipotesis 1,2,4,5,6,7,9,10, dan 11 diterima sedangkan hipotesis 3 dan 8 ditolak. Penelitian ini membuktikan bahwa korupsi di tingkat kabupaten/kota dan swasta memiliki korelasi positif signifikan terhadap realisasi total PAD, pajak daerah, belanja tidak langsung, dan belanja langsung. Semakin tinggi tingkat korupsinya, semakin tinggi pula pendapatan dan belanja daerahnya. Akan tetapi terdapat pengecualian terhadap satu hal. Korupsi di tingkat kabupaten/kota dan swasta tidak memiliki korelasi dengan realisasi retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan satu-satunya variabel yang tidak dipengaruhi oleh tingkat korupsi, baik publik maupun swasta.

Penelitian ini hanya menggunakan data publikasi KPK yang berarti, jumlah kasus korupsi yang disebutkan belum termasuk berbagai kasus korupsi lain, baik yang ditangani oleh aparat penegak hukum lain maupun yang belum terdeteksi. Oleh karena itu, cakupan kasus korupsi yang dijadikan

sampel untuk diolah secara statistik mungkin saja belum dapat mewakili seluruh populasi kasus nasional.

Hasil ini secara umum menjelaskan bahwa di Indonesia, korupsi merupakan “*grease of wheel*”. Menurut Wei (1999), fenomena ini menandakan aturan birokrasi di negara tersebut masih terlalu rumit. Industri terpaksa melakukan korupsi untuk melancarkan usahanya di Indonesia. Pengaruh korupsi di masa desentralisasi fiskal yang berkorelasi positif signifikan terhadap dimensi ekonomi daerah menunjukkan bahwa adanya desentralisasi tidak pula menghambat laju korupsi. Pertumbuhan korupsi di sektor pemerintah berkorelasi positif signifikan terhadap korupsi di sektor swasta. Pertumbuhan korupsi di kedua sektor juga diikuti dengan pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah.

Simpulan

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang tidak mampu mengungkapkan lebih jauh penyebab korupsi terus meningkat di masa desentralisasi fiskal sehingga hal tersebut dapat menjadi objek penelitian menarik di kemudian hari. Peneliti percaya persoalan ini dapat dijawab melalui penelitian kualitatif seperti wawancara mendalam terhadap para pelaku bisnis maupun pejabat publik. Pengecualian terhadap retribusi daerah yang tidak berkorelasi dengan korupsi di publik maupun privat juga menjadi objek yang menarik untuk diulas pada penelitian lanjutan.

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa korupsi di pemerintah kabupaten/kota dan swasta secara umum berkorelasi positif signifikan terhadap pendapatan dan belanja daerah. Jumlah korupsi di pemerintah kabupaten/kota dan swasta mengalami tren yang meningkat. Begitu juga dengan komponen-komponen pendapatan dan belanja daerah.

Jumlah korupsi di sektor pemerintah kabupaten/kota berkorelasi positif signifikan terhadap korupsi di sektor swasta. Pertumbuhan korupsi di kedua sektor juga berkorelasi positif signifikan terhadap realisasi PAD, Pajak Daerah, Belanja Langsung, dan Belanja Tidak Langsung. Akan tetapi, korupsi tidak memiliki korelasi dengan realisasi Retribusi Daerah. Hasil ini menjelaskan bahwa secara umum, di Indonesia, korupsi merupakan “*grease of wheel*”. Hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa pertumbuhan jumlah korupsi di pemerintah kabupaten/kota tidak menurun sepanjang era desentralisasi fiskal.

Penelitian terdahulu tentang “*grease of wheel*” menunjukkan bahwa fenomena ini terjadi akibat birokrasi dan regulasi di suatu negara yang terlalu rumit. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian ini, penulis berharap pemerintah sebagai regulator mampu menyederhanakan urusan birokrasi untuk meningkatkan kepastian berusaha di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adiguna, R., & Warsono, S. (2019). *Dualitas sebagai perspektif teoretis dalam ilmu manajemen dan akuntansi* (J. Hartono (ed.); Issue April). ANDI.
- Alfada, A. (2019). The destructive effect of corruption on economic growth in Indonesia: A threshold model. *Heliyon*, 5(10), e02649. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02649>
- Arsandi, S. A. (2022). Korupsi kepala daerah dan pertumbuhan industri : Studi dari Kabupaten dan Kota Mojokerto. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 103–112.
- Asmarani, N. G. C. (2020). *Apa itu PAD?* DDTC News.
- Baklouti, N., & Boujelbene, Y. (2020). Shadow economy, corruption, and economic growth: An empirical analysis. *The Review of Black Political Economy*, 47(3), 276–294. <https://doi.org/10.1177/0034644619885349>
- Boudreaux, C. J., Nikolaev, B. N., & Holcombe, R. G. (2018). Corruption and destructive entrepreneurship. *Small Business Economics*, 51(1), 181–202. <https://doi.org/10.1007/s11187-017-9927-x>
- BPS. (2019). *Statistik keuangan pemerintahan provinsi statistik keuangan pemerintah provinsi*. BPS RI.
- Cooray, A., & Dzhumashev, R. (2018). The effect of corruption on labour market outcomes.

- Economic Modelling*, 74, 207–218. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2018.05.015>
- Henderson, J. V., & Kuncoro, A. (2011). Corruption and local democratization in Indonesia: The role of Islamic parties. *Journal of Development Economics*, 94(2), 164–180. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2010.01.007>
- Hessami, Z. (2014). Political corruption, public procurement, and budget composition: Theory and evidence from OECD countries. *European Journal of Political Economy*, 34, 372–389. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2014.02.005>
- Hossain, A. T., Hossain, T., & Kryzanowski, L. (2020). Political corruption and corporate payouts. *Journal of Banking and Finance*, 123, 106016. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2020.106016>
- Huntington, S. P. (2006). *Political order in changing societies*. Yale University Press.
- Kasasbeh, H. A., Mdanat, M. F., & Khasawneh, R. (2018). Corruption and FDI inflows: Evidence from a small developing economy. *Asian Economic and Financial Review*, 8(8), 1075–1085. <https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2018.88.1075.1085>
- KPK. (2021). *Publikasi Data KPK*. Web.Kpk.Go.Id.
- Leff, N. H. (1964). Economic development through bureaucratic corruption. *American Behavioral Scientist*, 8(3), 8–14. <https://doi.org/10.1177/000276426400800303>
- Lessmann, C., & Markwardt, G. (2010). One size fits all? Decentralization, corruption, and the monitoring of bureaucrats. *World Development*, 38(4), 631–646. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.11.003>
- Lui, F. T. (1985). An equilibrium queuing model of bribery. *Journal of Political Economy*, 93(4), 760–781. <https://doi.org/10.1086/261329>
- Mello, L. de, & Barenstein, M. (2001). Fiskal decentralization and governance: A cross-country analysis. In *Governance, corruption, and economic performance*. International Monetary Fund.
- Nawatmi, S. (2016). Pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi studi empiris negara-negara Asia Pasifik. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 31(1), 14–25. <https://doi.org/10.24856/mem.v31i1.281>
- Putra, N. R., & Linda, R. (2022). Impact of social change on society from the crime of corruption. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 13–24. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.898>
- Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 32 tahun 2004, Dpr 249 (2004).
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. UU No 33 tahun 2004, 39 (2004).
- Saha, S., Beladi, H., & Kar, S. (2021). Corruption control, shadow economy and income inequality: Evidence from Asia. *Economic Systems*, 45(2). <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2020.100774>
- Samputra, P. L., & Munandar, A. I. (2019). Korupsi, indikator makro ekonomi, dan IPM terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 12(1), 35–46. <https://doi.org/10.24843/JEKT.2019.v12.i01.p04>
- Song, C.-Q., Chang, C.-P., & Gong, Q. (2021). Economic growth, corruption, and financial development: Global evidence. *Economic Modelling*, 94, 822–830. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.02.022>
- Tanzi, V., & Davoodi, H. (1998). Corruption, public investment, and growth. In *The Welfare State, Public Investment, and Growth* (pp. 41–60). Springer Japan. https://doi.org/10.1007/978-4-431-67939-4_4
- Vial, V., & Hanoteau, J. (2010). Corruption, manufacturing plant growth, and the Asian Paradox: Indonesian evidence. *World Development*, 38(5), 693–705.

<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.11.022>

Wei, S.-J. (1999). Corruption in economic, beneficial grease, minor annoyance, or major obstacle? In *Policy Research Working Paper*.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=604923

World Bank. (2020). *Anticorruption fact sheet*. Worldbank.Org.

Zakharov, N. (2019). Does corruption hinder investment? Evidence from Russian regions. *European Journal of Political Economy*, 56, 39–61.

<https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2018.06.005>